



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 878/IX/2015

I/SEPTEMBER 2015



PAMERAN FOTO, BUKTI HUBUNGAN BAIK DPR-MASYARAKAT



**KOMISI X
DPR SOROTI
IMPLEMENTASI
PIP**



**DPR TETAP
MENGACU PADA
HASIL AUDIT BPK**

Jangan lewatkan
info DPR terkini
dan live streaming
TV Parlemen di
www.dpr.go.id



PAMERAN FOTO BUKTI NYATA HUBUNGAN BAIK DPR-MASYARAKAT



Giliran Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi VII memotret para wartawan

Foto-foto hasil karya wartawan Koordinatoriat DPR RI menjadi sebuah gambaran dan bukti nyata akan hubungan yang telah terjalin antara DPR RI dengan masyarakat selama ini. Diharapkan melalui peran wartawan juga DPR dapat terus bersinergi dengan masyarakat luas untuk bisa membangun bangsa.

Hal tersebut diungkapkan Ketua

DPR RI, Setya Novanto usai meninjau pameran foto WARNA-WARNI DPR RI bertema DPR KITA, di lobi Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Jumat, (28/8).

“Setelah saya lihat, ada nilai seni yang berbeda dari masing-masing foto yang tentunya memberikan karakteristik masing-masing manusianya. Ini sebagai sebuah bentuk karya nyata du-

kungan wartawan Koordinatoriat DPR RI selama ini terhadap DPR, karena foto-foto tersebut menjadi bukti nyata hubungan dan sinergitas yang telah terjalin antara DPR RI dan masyarakat luas,” ungkap Novanto, begitu ia biasa disapa.

Untuk mengapresiasi wartawan, khususnya yang tergabung dalam wartawan Koordinatoriat DPR RI, maka tidak berlebihan di hari jadinya yang ke-70 tahun DPR sebagaimana tahun-tahun sebelumnya memamerkan foto-foto hasil jepretannya sekaligus melombakannya, dengan memperebutkan hadiah utama dua buah motor serta berbagai hadiah pendukung lainnya.

Bahkan, dikatakan Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, pihaknya kembali akan menyelenggarakan hal serupa (pameran dan lomba foto jurnalistik-red) pada hari Sumpah Pemuda Oktober dan hari Kesaktian Pancasila. Ia berharap acara ini dapat dijadikan ajang para jurnalis untuk lebih meningkatkan kemampuan dan nilai seni yang ada. (Ayu)/foto:andri/parle/hr

IMF PUJI FUNDAMENTAL EKONOMI INDONESIA

Walau sedang menghadapi perlambatan ekonomi karena pengaruh global, Indonesia tetap bisa segera keluar dari krisis ini, karena fundamental ekonominya cukup baik. Pemerintah Indonesia sudah sangat baik mengelola kebijakan ekonominya dibanding 15 tahun lalu saat krisis moneter.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Wakil Ketua DPR RI Taufik

Kurniawan dengan Managing Director of International Monetary Fund (IMF) Christine Madeleine Odette Lagarde di DPR, Rabu (2/9). Kedatangan delegasi IMF ke Indonesia untuk menghadiri undangan konferensi bersama antara Bank Indonesia dan IMF. Dan delegasi IMF menyempatkan diri untuk menemui Pimpinan DPR sebelum mengikuti konferensi tersebut.

“Tadi tidak dibahas soal utang piutang. Tetapi yang disampaikan adalah Indonesia setelah 15 tahun reformasi telah memiliki fundamental ekonomi yang sangat kuat. Struktur dan kondisi ekonomi sangat kondusif. IMF mengapresiasi apa yang dilakukan parlemen dan pemerintah Indonesia terhadap situasi global. Ini merupakan kerja keras bersama untuk bisa menghadapi krisis,” jelas Taufik.

Hadir mendampingi Taufik, Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad, Wakil Ketua Komisi XI Jon Erizal, dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Djoko Udjiyanto. Sementara Lagarde sendiri



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berjabat tangan dengan Managing Director of International Monetary Fund (IMF) Christine Madeleine Odette Lagarde

didampingi senior advisor, direktur, dan deputy IMF untuk Asia Pasifik. Pertemuan yang sangat bersahabat

ini sekaligus untuk tukar menukar informasi menyangkut perkembangan krisis global yang sangat terasa dam-

paknya di negara-negara berkembang.

Lagarde mengapresiasi kebijakan ekonomi makro yang diambil pemerintah Indonesia di tengah krisis. Apalagi, sambung Lagarde, Indonesia sudah memiliki jaring pengaman stabilitas keuangan yang justru akan kian membantu Indonesia menghadapi krisis global. Sementara menyinggung konferensi BI dan IMF, Taufik melihat hal itu sangat strategis untuk menyerap pengalaman menyelesaikan krisis global.

Dalam konferensi persnya usai pertemuan, Lagarde mengaku senang berkunjung ke Indonesia dan melihat dari dekat perekonomian Indonesia. Dalam kesempatan itu, ia juga menyerukan agar kaum perempuan diberi peran maksimal dalam bidang perbankan dan keuangan. Inklusifitas perempuan perlu diusung agar bisa ikut berperan mengambil kebijakan di sektor ekonomi suatu negara. (mh)

foto:andri/parle/hr

DPR TETAP MENGACU PADA HASIL AUDIT BPK

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan, dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahun anggaran berikutnya, DPR tetap mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun sebelumnya. Termasuk dalam pembahasan RAPBN 2016, DPR mempertimbangkan hasil audit BPK pada pelaksanaan APBN 2014.

Demikian dikatakan Taufik usai Rapat Paripurna dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 menjadi Undang-undang di Gedung Nusantara II, Selasa (2/09/15). DPR menyetujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014 menjadi UU.

“DPR juga tetap memperhatikan faktor penyerapan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L). Pada prinsipnya, DPR setuju dengan sistem *reward and punishment* dalam evaluasi anggaran tahun 2014 terkait hasil pemeriksaan BPK,” kata Taufik, usai

memimpin rapat.

Politikus F-PAN itu mengakui, tidak mudah untuk mempertahankan kinerja penyerapan anggaran K/L. Sehingga tak dipungkiri, ada K/L yang sampai dua tahun berturut-turut mendapatkan opini TMP. Taufik melihat, kondisi ekonomi kekinian yang tidak bersahabat juga turut mempengaruhi. Termasuk pengaruh manajerial, persoalan birokrasi, atau penggunaan anggaran dari pemerintahan sebelumnya.

“Permasalahan setiap K/L itu berbeda. Kami juga melihat kinerja setiap K/L itu mencerminkan kemampuan masing-masing menteri yang memimpin. Tapi ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Harus ada upaya supaya serapan anggaran tetap baik meskipun pada masa transisi,” imbuhnya.

Politikus asal daerah pemilihan Jawa Tengah ini menegaskan, K/L yang berturut-turut mendapat opini TMP tentu harus mendapat perhatian. Tentunya, terhadap hal itu harus dicari solusi yang terbaik.

“Konkretnya nanti ada pada pembahasan anggaran masing-masing K/L.



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Apakah kemudian anggarannya akan dikurangi oleh pemerintah atau tidak, tentu akan diputuskan setelah melalui dinamika pembahasan,” katanya.

Taufik juga mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa menaikkan anggaran bagi kementerian yang tidak mampu memperbaiki kinerjanya. Pasalnya, tidak mungkin menambah anggaran kepada K/L yang memiliki laporan keuangan yang buruk. Dikhawatirkan, penambahan anggaran itu justru malah membebani.

“Rapor jelek kementerian akan menjadi pertimbangan yang sangat spesifik. Meski demikian, DPR tidak akan serta merta menurunkan anggaran terhadap kementerian bersangkutan. Tapi ini semua sesuai keputusan

pemerintah karena mereka yang menentukan. DPR hanya menyetujui,” tukasnya.

Taufik juga menggarisbawahi, dalam kurun waktu 6 tahun ini, DPR memperoleh opini WTP dari BPK. Dalam

aspek akuntabilitas publik, berarti DPR telah memenuhi pemeriksaan auditor negara. “Tentu hal ini tidak mudah dicapai,” imbuhnya.

Dalam Rapat Paripurna itu, Badan Anggaran juga melaporkan hasil

Pembicaraan Tingkat I, dan Pemerintah menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah. (sf), foto : jaka nugraha/parle/hr.

DPR APRESIASI KINERJA PANSEL KPK

Panitia Seleksi KPK Selasa (1/9) menyerahkan nama-nama calon pimpinan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Wakil ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, DPR sangat mengapresiasi kinerja yang ditunjukkan oleh Panitia Seleksi KPK yang menyerahkan delapan nama calon pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi.

“Informasi yang saya dapatkan, panel KPK akan menyerahkan delapan nama capim KPK kepada Presiden di Istana Negara, dan DPR secara keseluruhan mengapresiasi kinerja mereka,” jelas Taufik Kurniawan kepada wartawan di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (01/09).

Taufik menuturkan, DPR sangat mendukung penuh keberadaan KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum, untuk mengawal proses pemberantasan korupsi. “DPR mendukung penuh keberadaan KPK, karena sebagai salah satu lembaga penegak hukum, KPK masih sangat dibutuhkan untuk mengawal proses pemberantasan korupsi di Indonesia,” ungkap Taufik.

Terkait dengan adanya capim KPK, yang dikabarkan menjadi tersangka, Taufik menegaskan, bahwa masalah terse-



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan sedang diwawancarai wartawan

but merupakan ranah dari penegak hukum. “DPR tidak akan mencampuri urusan penegak hukum terkait dengan status tersangka salah satu capim KPK, DPR hanya menunggu saja proses selanjutnya, dimana setelah diserahkan kepada Presiden kemudian diteruskan kepada DPR melalui *fit and proper test* di Komisi III dan semoga mereka yang akan terpilih bisa membawa KPK menjadi lebih baik ke depannya,” tegas Taufik Kurniawan.

Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri menyatakan, diantara 19 nama calon pimpinan KPK, salah satunya berstatus sebagai tersangka. (as), foto : andri/parle/hr

Sayembara Penataan Komplek Parlemen Harus Sukses



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat memimpin Rapat Tim Implementasi Reformasi DPR dengan Ikatan Arsitek Indonesia beserta tokoh senior IAI

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, studi awal termasuk sayembara penataan kompleks parlemen harus

sukses, karena ini adalah sebagai upaya meletakkan *blue print* (cetak biru) menuju masa depan.

“Ini adalah keberlanjutan dari proses kita membangun pilar-pilar bernegara dan pilar demokrasi. Di level Pimpinan tidak ada keraguan bahwa proses ini harus berjalan terus karena tidak mungkin kita membiarkan anomali kondisi kita menjadi tertawaan orang,” katanya saat memimpin Rapat Tim Implementasi Reformasi DPR dengan Ikatan Arsitek Indonesia beserta tokoh senior IAI di Jakarta, Senin (31/8).

Menurut Fahri, transformasi yang luar biasa terjadi sejak 17 tahun lalu, ada demokrasi di Indonesia dan lahirlah 4 kali amandemen UUD 45, yang secara jelas menyebutkan bahwa kekuasaan Presiden itu dirampas oleh rakyat melalui penguatan Dewan. “Maka mustahil Dewan tidak berubah,” tegasnya.

Kalau dulu 450 anggota DPR tidak punya staf, ibarat orang baru kawin berdua, kamar nya hanya 2x4 meter. Sekarang dengan Keppres tentang Badan Kajian sudah turun, maka seorang anggota punya 7 staf.

“Jadi sekarang sudah punya 7 anak, masak masih mau ti-



dur di tempat yang sama. Itu pemikiran sederhananya. Buat Pimpinan, Tim maupun BURT tidak ada masalah. Mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan, sebab presentasi kali ini akan kita buka ke publik,” katanya.

Sesuai penjelasan Pengurus IAI, pada 7 September ini peserta memasukkan karya sayembara arsitektur DPR dan nanti akan dinilai dewan juri. Lalu pada 14 September akan dilihat wujud arsitekturnya seperti apa. Apa yang menjadi batasan oleh arsitek senior sudah dirangkum dalam kerangka acuan kerja

Anggota Tim Muhidin M Said dari FPG menilai komunikasi dengan masyarakat tentang penataan kawasan parlemen itu yang penting. Upaya yang dilakukan Tim seperti sayembara belum ditangkap oleh masyarakat. Sebaiknya rencana ini disolidkan di tingkat fraksi. “Bagaimana mampu meyakinkan teman-teman sehingga bisa diterima masyarakat,” ujarnya.

Darul Siska selaku tim Ketua DPR menyatakan, yang dilihat masyarakat sekarang selalu bicara ekonomi susah, kok DPR bangun gedung. Dan ini telah terjadi DPR lalu sejak 2008, tahun 2009 Ketua DPR Marzuki Alie ketika itu tidak mau bikin sayembara sehingga sampai 2014 tidak ada ge-

rakan apa-apa.

“Kalau sayembara sekarang tidak jadi, maka 4 tahun ke depan DPR tidak bisa bikin apa-apa. Menurut saya yakinkan masyarakat dan media dengan mengkongkritkan latar belakang penataan kompleks Senayan dikemas dengan bahasa yang bagus, termasuk *road show* ke media,” katanya.

DPR sekarang, kata Darul Siska akan menghadapi musibah besar kalau penumpang (penghuni) di gedung Nusantara I tidak dikurangi, sebab kapasitasnya 800 orang, kini dihuni 3.400 orang.

Sementara Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso menyatakan, rakyat harus mengerti mengapa DPR perlu melakukan penataan kompleks parlemen Senayan. Karena seringkali informasi yang diterima masyarakat salah, seperti masalah kasur, pewangi dengan anggaran yang dinilai terlalu besar.

“Mungkin pihak kehumasan perlu lebih giat lagi membeberitakan hal ini dengan lebih kuat dan berani. Dewan membangun bukan untuk DPR sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsa Indonesia semuanya,” ujarnya. (mp), foto : andri/parle/hr.

Ribuan Masyarakat Hadiri Pagelaran Wayang Kulit di DPR



Aksi Dalang Ki Enthus Susmono di DPR RI

Puncak rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI dan HUT DPR RI ke-70, ditampilkan Pagelaran Wayang Kulit dengan lakon Semar Pe’peling oleh dalang Ki Enthus Susmono, di lapangan Sepak Bola DPR Sabtu – Minggu (29-30/8).

Pagelaran Wayang Kulit tersebut terbuka untuk masyarakat umum sehingga ribuan masyarakat menghadiri acara Pagelaran Wayang Kulit tersebut. Mereka ikut menikmati alur cerita yang dibawakan Dalang Ki Enthus Susmono yang juga menjabat sebagai Bupati Tegal. Para pedagang kaki lima juga turut meramaikan Pagelaran Wayang Kulit tersebut.

Selain antusias menyaksikan alur cerita Semar Pe’peling,

masyarakat juga menyambut baik ketika dalang mengatakan “Di usianya yang ke-70 tahun, DPR semakin dewasa dan aspiratif”. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang hadir membuka acara tersebut juga menikmati alur cerita dan bersama sejumlah anggota DPR membaaur dengan masyarakat terhibur oleh dalang yang terkenal kocak ini.

Semar Pe’peling berkisah tentang Prabu Parikesit, Raja Yawastina dihadapan para nayaka/prajurit menerima kedatangan Semar. Ki Lurah Semar, sebagai wakil rakyat menyampaikan keprihatinannya atas kondisi Yawastina yang semakin banyak begal, pengangguran dan kemiskinan. Semar kemudian mengingatkan atau memberi Pe’peling kepada Prabu Parikesit supaya segera mengambil tindakan.

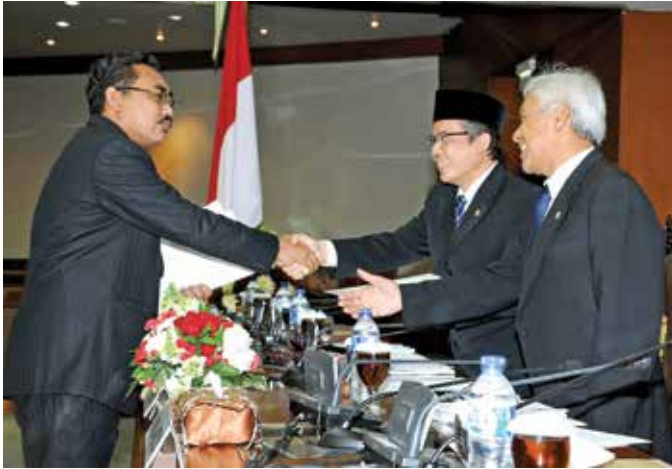
Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisyam yang juga Ketua Panitia Pagelaran Wayang Kulit menyampaikan bahwa dari cerita tersebut diharapkan kita semua mengambil filosofi tontonan dan tuntunan cerita wayang ini yang hampir sama dan sebanding dengan kondisi negara kita.

Ridwan mengatakan, acara ini merupakan puncak dari kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI dan HUT DPR RI yang ke-70. Peringatan tersebut diawali dengan beberapa agenda. Di antaranya Pidato Kenegaraan Presiden RI pada 15 Agustus 2015 dan Pesta Rakyat pada esok harinya, berupa panjat 70 bambu.

“Ada juga Pameran Seni rupa, Pameran Filatelis dan Numismatik Indonesia, pameran batu mulia, dan Pidato Ketua DPR RI pada 28 Agustus,” kata Ridwan Hisyam.

Acara ini lanjut Ridwan, juga merupakan bentuk kepedulian DPR RI terhadap Budaya Adiluhung bangsa yang tetap dilestarikan dan bentuk silaturahmi dengan masyarakat penggemar wayang kulit di Jakarta. (skr,mp) foto:jaka/parle/hr

DPR SETUJUI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN 2014



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menerima laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014 dari Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawaid

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Selasa (1/09/15). Sejumlah catatan menyertai persetujuan ini.

“Apakah RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014 dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir. Jawaban ‘setuju’ pun terdengar menggema.

Sebelumnya, saat membacakan laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014, Wakil Ketua Badan Anggaran Jazilul Fawaid menyampaikan, seluruh fraksi menyampaikan beberapa pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir fraksi di Banggar.

Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan agar dilakukan pendalaman mengenai regulasi terkait dengan mekanisme dan pemanfaatan dana USO Kemenkominfo serta evaluasi terhadap BP3TI. Selain itu, pemerintah harus mempersingkat birokrasi pencairan anggaran dan revisi DIPA terutama belanja modal dengan tujuan agar belanja negara dapat diserap maksimal oleh K/L maupun Pemda.

“Fraksi Partai Golkar mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan pengelolaan negara, terutama menyangkut permasalahan yang mempengaruhi kewajaran LKPP 2014. Disamping itu, masih terlihat temuan BPK yang merupakan pengulangan dari temuan BPK tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pemerintah kurang memiliki *sense of crisis* karena tidak menindaklanjuti temuan BPK sejak penyimpangan ditemukan,” kata Jazilul.

Sementara, Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2014 seperti dalam laporan LKPP tidak sejalan dan belum bisa memenuhi target dan gagal mengantisipasi serta mengatasi pengaruh eksternal terhadap kinerja anggaran. Kegagalan itu memperburuk fundamental ekonomi yang membuat Rupiah terus melemah, dan menjadikan

beban hidup masyarakat semakin berat.

Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah tetap mengambil langkah terstruktur dalam penyajian informasi SDA dan terus melakukan inventarisasi serta penilaian aset secara komprehensif di seluruh K/L teknis. Fraksi PAN meminta pemerintah menerapkan punishment bagi K/L yang mendapatkan opini TMP selama dua tahun berturut-turut. Fraksi PAN juga mendesak agar BPK melakukan audit kinerja dan tidak hanya audit terhadap laporan keuangannya.

“F-PKB memandang bahwa diaturnya ketentuan mengenai Pemerintah agar melakukan akuntansi berbasis akrual dan melaksanakan pembinaan secara intensif pada seluruh instansi Pemerintah Pusat, maka dipastikan akan mendorong ke arah perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara,” imbuh politikus F-PKB itu.

Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan penyajian LKKL agar dapat memperoleh LKKL agar dapat memperoleh opini WTP. Fraksi PPP menilai perlu ada sistem yang terbuka yang memungkinkan rakyat dapat mengawasi pelaksanaan anggaran K/L, termasuk keuangan daerah atau APBD.

“Fraksi Partai Nasdem memandang perlu dilakukan revaluasi aset atas dasar harga pasar. Dan Fraksi Partai Hanura meminta Pemerintah untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh,” imbuh Jazilul.

Lebih lanjut, politikus asal Dapil Jawa Timur itu menyatakan, dari Pembahasan Tingkat I, maka Banggar sepakat agar pemerintah meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap LKPP, LKBUN, dan LKKL yang masih mendapatkan opini audit WDP atau TMP. Pemerintah juga diminta menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPP 2014.

“Pemerintah harus memonitor penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman pada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif,” tambah Jazilul.

Jazilul menambahkan, pemerintah diminta menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat menyajikan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah.

Pemerintah juga diminta untuk menyebarluaskan informasi LKPP kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah telah dan akan terus konsisten berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Pemerintah juga akan melakukan perbaikan terhadap pencatatan aset tetap, penyempurnaan sistem akuntansi hibah, perbaikan pengelolaan rekening pemerintah, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan komitmen para menteri/pimpinan lembaga untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik, serta peningkatan kualitas LKKL.

Pada tahun anggaran 2014, terdapat 85 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang diaudit dan diberikan opini oleh BPK. Dari 85 LKKL, sebanyak 62 di antaranya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 17

mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 7 lainnya mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Sementara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapat opini WDP, masih sama dengan opini tahun 2013. (sf), foto : iwan armanias/parle/hr

KOMISI X DPR SOROTI IMPLEMENTASI PIP

Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi sorotan Komisi X DPR saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan. Pasalnya, Komisi X masih menemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Anggota Komisi X Elviana melihat, masih ada permasalahan dalam penyaluran dana PIP. Bahkan kerjasama dengan bank untuk menyalurkan dana PIP, melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), masih terdapat kesalahpahaman dalam mekanisme penyaluran pencairan dananya.

“Misalnya, Bank BRI memperlakukan siswa seperti nasabah biasa, sehingga jika ada data yang kurang seperti KTP, maka dana itu tidak bisa cair. Bank BRI juga tidak tahu jika KIP juga ada untuk anak – anak yang putus sekolah,” tegas Elviana, di Gedung Nusantara I, Rabu (2/09/15).

Jika dana PIP selalu sulit untuk dicairkan, politikus F-PPP itu khawatir, dana PIP akan banyak sekali yang tidak terserap kepada para pelajar, jika tetap mengandalkan model pembayaran seperti sekarang.

“Dari tahun ke tahun yang diungkapkan hanya persoalannya bukan solusinya. Kita minta kepada Pak Menteri untuk menjelaskan solusinya,” tegas politikus asal daerah pemilihan Jambi itu.

Sementara itu, Anggota Komisi X

Jefirstson Riwu Kore belum melihat apakah implementasi PIP ini sudah tepat sasaran atau belum. Namun ia menilai, jumlah penyaluran, politikus F-PD ini menilai sudah cukup bagus.

“Kami belum bisa melihat secara keseluruhan sasaran sudah tepat atau belum. Secara jumlah, sudah cukup bagus dan merupakan program lanjutan dari program beasiswa Pemerintahan Presiden sebelumnya, hanya terletak pada perbedaan namanya saja,” nilai politikus asal daerah pemilihan NTT itu.

Sebelumnya Mendikbud menjelaskan, realisasi penyaluran Kartu Indonesia Pintar per 30 Agustus 2015 sudah mencapai 9,5 juta dari total 17 juta penerima.

“Kita bisa menjangkau target hingga akhir November 2015,” janji Mendikbud.

Koordinasi dengan Kemenpar

Masih dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X Sri Meliyana juga mempertanyakan rencana Kemendikbud untuk menjadi tamu di Frankfurt Book Fair, Jerman, Oktober mendatang. Politikus F-Gerindra ini mempertanyakan, apakah Kemendikbud sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata.

“Apakah keikutsertaan Indonesia dalam acara Frankfurt Book Fair sudah berkoordinasi dengan Menteri Pariwisata? Seharusnya agar dilakukan



Anggota Komisi X DPR Elviana

koordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Pariwisata,” saran politikus asal daerah pemilihan Sumatera Selatan itu.

Mendikbud menjelaskan, Indonesia akan menjadi tamu kehormatan (Guest of Honour) di Frankfurt Book Fair, pada 14 – 18 Oktober 2015. Perayaan pameran buku terbesar yang diadakan setiap tahun ini, meliputi kegiatan kebudayaan, buku, kuliner, seni tari, dan seluruh aspek kebudayaan.

Direncanakan, Indonesia akan memangkatkan 400 orang sastrawan, budayawan, dan seniman. Mendikbud memastikan, persiapan tim sudah mencapai 90%.

“Disinilah Indonesia menunjukkan seluruh ekspresi budaya, dan ini kesempatan bagi para penggiat budaya Indonesia bisa memanfaatkan panggung dunia,” yakin Mendikbud. (sf,ctr)

foto : jaka/parle/hr



Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena

Menkes Diminta Beri Perhatian Pada Kesehatan Jamaah Haji

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena minta Menteri Kesehatan RI (Menkes) Nila Djuwita Moeloek memberikan perhatian pada kesehatan para jemaah haji.

“Kami berharap bahwa seluruh fasilitas kesehatan haji mulai sebelum keberangkatan jemaah haji, kemudian mereka masuk ke embarkasi, dan mereka terbang kemudian sampai di Ma-

dinah, ini harus dapat perhatian secara sungguh-sungguh dari Kementerian Kesehatan,” kata Ermalena di sela-sela Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/09/2015).

Ia menjelaskan, bahwa dari sidak yang dilakukan Komisi IX ke beberapa embarkasi, ditemukan fasilitas kesehatan yang tersedia untuk melayani

jemaah haji masih sangat terbatas, dan perlu mendapat perhatian dari Menteri Kesehatan.

“Di kesempatan ini (Rapat Kerja red), kita ingin menanyakan berapa jumlah anggaran mulai tahun 2014-2015. Karena sekarang Komisi IX sedang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kesehatan Haji dengan harapan bahwa risti (gelang yang digunakan para je-

maah haji Indonesia) bisa tertangani dengan semestinya,” tegas politisi Fraksi PPP ini.

Agenda Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Pius Lustrilang tersebut adalah Sikap Kementerian Kesehatan terhadap Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besa-

ran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi, Evaluasi Penggunaan Metode INA-CBGs di Rumah Sakit, Persiapan Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2015 dan Laporan Pelaksanaan Kesehatan Haji 2014, dan Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2015 Semester I dan penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan. (sc/dhi)

foto: jaka/parle/hr

Indonesia Perlu Bantu Korban Konflik di Irak dan Suriah

Anggota Komisi I DPR RI Darizal Basir meminta agar Indonesia turut aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke negara-negara yang tengah dilanda konflik di Timur Tengah, seperti Irak dan Suriah. Dua negara tersebut tengah dilanda krisis multi dimensi akibat konflik internal yang menyebabkan munculnya gelombang pengungsian cukup besar dari negara ini.

“Perekonomian bangsa memang belum stabil, tetapi memberikan bantuan kepada negara-negara yang tengah dilanda konflik tidak akan menjadikan bangsa ini miskin dan hancur”, katanya usai Rapat Dengar Pendapat dengan Dubes RI untuk Suriah, Djoko Harjanto, dan Dubes RI untuk Irak, Safzen Noerdin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Rabu (2/9/15).

Ia mengingatkan ketika Indonesia membutuhkan dukungan politik bagi kemerdekaan, Irak adalah negara yang secara cepat memberikan dukungan politik tersebut. Irak juga adalah negara yang selalu membanggakan Indonesia sebagai negara demokrasi muslim terbesar di dunia. “Kini saatnya kita menunjukkan pada Irak bahwa Indonesia tidak akan melupakan sejarah dan meninggalkan sahabatnya. Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan” lanjutnya.

Sebentar lagi menurutnya akan datang musim dingin di Irak yang puncaknya pada November nanti. Anak-anak dikhawatirkan akan semakin menderita dan tewas karena kekurangan serta kelaparan di tenda-tenda pengungsian. “Sebuah selimut dan dan semangkuk sup hangat untuk setiap orang dari Indonesia akan sangat berarti bagi keselamatan hidup mereka.”



Suasana rapat Komisi I DPR dengan Dubes RI untuk Suriah dan Irak

Terhadap Suriah, Indonesia juga berkewajiban memberikan bantuan. Darizal mengingatkan bahwa ketika Aceh dilanda tsunami, Rakyat Suriah membantu US\$ 250 ribu. Saat ini Suriah sangat berharap Indonesia mau memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk finansial, bukan barang. “Ini karena jika dalam bentuk barang, mereka akan kesulitan membayar orang atau petugas yang mengangkutnya”, kata wakil rakyat dari dapil Sumbar I ini.

Namun demikian Darizal mengingatkan bahwa karena situasi Suriah dan Irak saat ini dipenuhi oleh kelompok-kelompok yang memiliki afiliasi dan kepentingan yang sangat beragam, maka bantuan harus disalurkan se-

cara selektif dan hati-hati. “Jangan sampai bantuan tersebut dinikmati oleh kelompok-kelompok yang bertikai atau kelompok teroris seperti ISIS sementara rakyat Suriah dan Irak yang betul-betul membutuhkan justru tidak terjangkau”.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengimbau agar seluruh bantuan yang ada nantinya disalurkan melalui satu pintu, yaitu KBRI baik Irak maupun Suriah. “Ini karena KBRI lebih mengetahui kondisi dan peta di lapangan konflik sehingga bantuan kita benar-benar jatuh ke tangan yang berhak”, tandas Darizal. (iky) *foto: naefuroji/parle/hr*

Komisi V DPR Kritisi Kinerja Kementerian PUPR

Komisi V DPR mengkritisi Kementerian PUPR yang kerap melakukan pekerjaan yang tidak perlu guna mengejar serapan anggaran di Kementerianannya.

“Sewaktu saya mudik ke Jawa Tengah. Saya berangkat itu jalannya mulus bisa buat ngebut. Tapi waktu saya pulang, ada pekerjaan pembetonan. Buat apa jalan mulus dibeton lagi. Jangan karena hanya mengejar serapan anggaran, pekerjaan yang tidak perlu malah dilakukan,” jelas Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB Muhammad Toha saat Raker dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Gedung DPR, Rabu, (2/9).

Dia menegaskan, daripada melakukan pekerjaan yang tidak perlu, lebih baik dana tersebut dialokasikan untuk melakukan pekerjaan infrastruktur lain yang lebih penting.

“Seperti Pantura itu kalau tidak perlu ada pekerjaan ya *nggak* perlu diada-adakan, jangan dibuat-buat. Lebih baik perbaiki jalan lintas selatan itu yang jalannya masih rusak-rusak. Atau untuk jalan perbatasan di luar Pulau Jawa. Itu akan lebih berguna,” tegasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, hingga 2 September Kementerian telah berhasil merealisasikan serapan anggaran sebesar 32,74% atau Rp 38,9 triliun, setara dengan 35,62%.



Suasana rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri PUPR

Berikut rinciannya, Ditjen Bina Marga Rp 19,6 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp 11,2 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 6,2 triliun, dan Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 1,05 triliun. (Si) foto: rizka/parle/hr



Anggota Komisi IV DPR Hardisoesilo

Kalangan Komisi IV DPR berharap pembentukan Badan Karantina Nasional (BKN) mampu mengoptimalkan upaya karantina untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati dengan mencegah masuk dan tersebarnya hama serta penyakit hewan, ikan serta tumbuhan ke dalam negeri.

Saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk penyusunan naskah akademik dan draft RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan sejumlah pelaku usaha di Gedung DPR Jakarta, Selasa (1/9), anggota Komisi IV dari FPG Hardisoesilo mengemukakan bahwa Badan Karantina Nasional itu nantinya merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang langsung di bawah Presiden RI.

“Dengan demikian nantinya institusi

PEMBENTUKAN BKN OPTIMALKAN PERKARANTINAAN

tersebut tidak hanya berperan mengaktifkan dan mengoptimalkan koordinasi tetapi lebih dari itu bisa lebih *solid* lagi dengan adanya sejumlah gugus tugas operasional dalam perkarantina-an,” ujar Hardisoesilo.

Saat ini masalah karantina tersebar dalam sejumlah kementerian, yakni untuk karantina ikan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara karantina hewan dan karantina tumbuhan berada di Kementerian Pertanian.

Lebih lanjut Hardisoesilo menuturkan bahwa BKN ini juga akan terintegrasi dengan keimigrasian dan bea cukai, sebagaimana lazimnya perkarantina-an di negara-negara maju, semisal di Amerika Serikat dengan lembaga yang bernama ‘US Custom and Border Protection’.

Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Murtazam menambahkan, BKN ini menjadi salah satu substansi dalam RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tum-

buhan yang tengah disiapkan sebagai RUU inisiatif DPR. “Karena itu kami membutuhkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum melakukan pembahasan RUU ini bersama pemerintah,” ujarnya.

Dalam RDPU itu, Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menyatakan dukungannya atas keberadaan BKN ini karena institusi tersebut bisa dijadikan bumper untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya para petani dan nelayan dari gempuran produk pertanian dan perikanan impor.

Menurut dia, setelah diberlakukannya era perdagangan bebas masyarakat ASEAN dan juga global, maka satu-satunya instrumen penghambat non tarif produk untuk masuk ke Indonesia hanyalah karantina.

Hal senada disampaikan Ketua Asosiasi Eksporir-Importir Buah dan Sayuran, Khafid Siroituddin yang mengatakan bahwa hal terpenting dalam

pembentukan infrastruktur baru di bidang perkarantina itu adalah adanya kejelasan aturan main dan transparansi.

“Yang dibutuhkan para pengusaha itu sederhana saja, yakni ada kepastian dalam hal waktu karantina maupun biayanya. Kepastian ini penting

mengingat produk buah-buahan dan sayuran masa bertahannya singkat dan mudah rusak dalam perjalanan,” katanya. (as) foto: rizka/parle/hr

PENYERAPAN ANGGARAN BNPB 2015 MASIH RENDAH

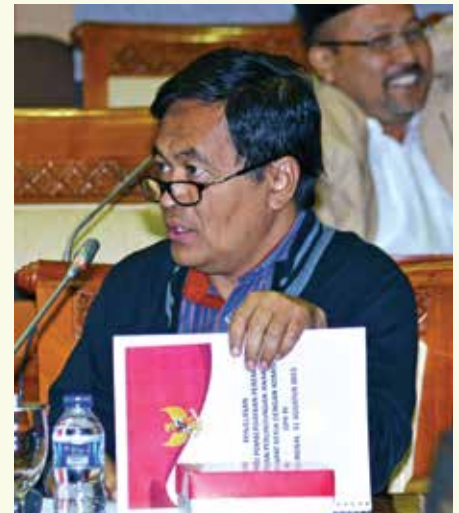
Anggota Komisi VIII DPR RI, Kuswiyanto memaklumi penyerapan anggaran BNPB tahun 2015 masih rendah, yakni baru mencapai 42 persen per Agustus 2015. Hal tersebut diungkapkannya baru-baru ini kepada wartawan.

“Menurut penjelasan Kepala BNPB, Syamsul Maarif, masih rendahnya penyerapan anggaran tahun 2015 disebabkan karena masih berlangsungnya proses tender berbagai macam program BNPB, seperti pengadaan jembatan, tanggul dan berbagai infrastruktur pertanian akibat bencana. Sekitar September dan Oktober akan selesai, saat itu penyerapan anggaran BNPB akan melonjak tinggi, sehingga pada Desember kemungkinan besar penyerapannya akan mendekati seratus persen. Tiga tahun belakangan kecenderungannya memang seperti itu,” jelas Kus, begitu ia biasa disapa.

Sementara itu terkait dana *on call* yang dimiliki BNPB, Kus berharap agar dana itu harus dalam jumlah yang mencukupi. Paling tidak menurutnya, saat terjadi bencana, dana tersebut dapat langsung digunakan.

“Kita memang tidak menginginkan bencana, tapi semua itu merupakan takdir Tuhan yang tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu kita harus siap siaga untuk mengantisipasi kemungkinan jatuhnya korban jiwa, salah satunya dengan menyiapkan dana *on call* dengan jumlah yang cukup. Sehingga ketika musibah itu datang, dana tersebut dapat langsung digunakan untuk menangani para korban,” jelas Politisi dari Fraksi PAN ini.

Ditambahkannya, agar pusat-pusat logistik tidak hanya ditempatkan di Jakarta saja, melainkan harus tersebar di beberapa titik, seperti di wilayah Indonesia bagian timur di Papua, pulau



Anggota Komisi VIII DPR Kuswiyanto

Kalimantan di Pontianak, Sumatera di Medan, dan Sulawesi di Makassar. Sehingga ketika terjadi bencana, segala sesuatunya sudah siap, seperti tenda, dan berbagai peralatan penanganan bencana lainnya. (Ayu), foto: naefurodijie/parle/hr



Deputi Perundang-undangan Setjen DPR RI, K. Johnson Rajagukguk

Deputi Perundang-undangan Setjen DPR RI, K. Johnson Rajagukguk menilai perlunya pemahaman di masyarakat

TARGET PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK SEMATA DARI KUANTITAS

bahwa target perundang-undangan DPR RI tidak semata dilihat dari sisi kuantitas atau jumlahnya saja. Hal tersebut diungkapkannya usai sidang paripurna DPR RI memperingati Hari Ulang Tahun DPR RI yang ke-70 Tahun di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta.

“Ketika dewan belum bisa melaksanakan target yang dibuatnya tentang target prolegnas (Program Legislasi Nasional), maka terkadang masyarakat memandang lain, itu sebenarnya sah saja. Namun yang harus diingat target prolegnas berupa produk perundang-undangan itu merupakan sebuah proyeksi. Pembentukan perundang-undangan itu hendaknya jangan hanya dilihat dari jumlah Undang-undangnya saja, melainkan kualitas dari Undang-undang itu sendiri,” ungkap Johnson.

Selain itu dilanjutkannya, kebutuhan dari produk hukum itu sendiri dari ma-

sarakat, apakah itu bisa dilaksanakan. Karena kewenangan DPR itu bukan tidak terbatas. Secara konstitusional ada beberapa pihak yang ikut berperan dalam proses pembuatan perundang-undangan itu sendiri, pemerintah (presiden), serta kewenangan DPD (dewan perwakilan daerah) untuk RUU tertentu. Ketiga kewenangan itu harus bersinergi, mulai dari penyusunan program legislasi, penyusunan RUU, dan pembahasan RUU. Hal tersebut sejatinya juga harus dipahami oleh seluruh masyarakat, dengan demikian tidak ada lagi salah paham terkait Prolegnas.

Meski demikian, di hari jadi DPR yang ke-70 pada 28 Agustus 2015 ini, Johnson menyukuri setiap perjalanan sejarah yang telah dilalui oleh lembaga tinggi negara ini. Begitupun dengan perjalanan Setjen DPR dalam mendampingi dewan selama ini.



“Kendala dewan dan setjen dalam mendampingi dewan tentu ada, namun semua itu kami anggap sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi, dievaluasi dengan baik. Di Ulangtahun ke-70 inilah sebagai momen yang baik untuk

memperbaiki semua itu,” pungkas Johnson seraya mengucapkan selamat ulangtahun ke-70 tahun DPR RI tercinta ini. (Ayu)
foto:jaka/parle/iw.



Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus berjabat tangan dengan Menteri Perhubungan

Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pemenuhan standar internasional keselamatan penerbangan dan pelayaran berdasarkan ketentuan ICAO dan IMO. Demikian salah satu butir kesimpulan Komisi V DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus, di Gedung DPR, Selasa, (1/9).

Butir kesimpulan lainnya, terkait keselamatan dan keamanan penerbangan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan juga sepakat akan

Komisi V DPR Desak Kemenhub Tingkatkan Standar Penerbangan

melakukan pembahasan secara khusus dalam rapat kerja berikutnya.

Pada kesempatan itu, Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil-hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam proses pembahasan program dan pengalokasian anggaran Kementerian Perhubungan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, jelas Lasarus, Komisi V DPR RI juga mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran termasuk mengatasi hambatan sehingga target pencapaian yang direncanakan dapat terealisasi minimal sebesar 84,59%.

Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan sepakat bahwa kelengkapan dokumen seperti *Term of Reference* (TOR) dan *Detail Engineering Design* (DED) merupakan bagian persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses penyusunan dan pembahasan anggaran Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran selanjutnya. (Si), foto : rizka arinindya/parle/hr.

Komisi VII DPR Soroti Karut Marut Distribusi BBM

Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi mendesak Menteri ESDM untuk mengurai carut marut distribusi BBM dan elpiji yang masih kerap terjadi. Karena itu, ketidakhadiran Menteri ESDM Sudirman Said patut disayangkan dimana seharusnya kehadiran diperlukan untuk mengurai persoalan BBM tersebut.

“Ini sangat disayangkan, karena karut marut distribusi BBM dan elpiji masih terjadi, karena itu Komisi VII DPR mendesak untuk segera dicarikan solusi lantaran berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, perlu segera dicarikan solusi karena berkaitan langsung dengan kepentingan

rakyat. “Fungsi pengawasan dan pembahasan mengarah pada distribusi BBM dan elpiji sampai pengelolaan Wilayah Kerja Migas,” kata Mulyadi Saat Raker dengan Menteri ESDM, namun diwakili Dirjen Migas, Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja. Turut hadir dalam rapat tersebut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas),

PT Pertamina (Persero).
Selasa, (1/9).

Pada kesempatan itu, Sejumlah Anggota Komisi VII DPR mengkritisi perihal data distribusi elpiji subsidi yang belum transparan. “Ini volume dan besaran subsidi sampai berapa hingga Juni, harus dijelaskan oleh Dirjen Migas ESDM,” jelas Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian. (Si),



Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian

foto : andri/parle/hr

Pleno Baleg Terima RUU Perlindungan TKI Usul Komisi IX DPR



Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo menerima Revisi UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Rapat Pleno Baleg DPR RI menerima Rancangan Undang-Undang Revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri usulan Komisi IX DPR RI.

“Badan Legislasi DPR RI dapat menerima RUU Revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) usul Komisi IX DPR RI,” kata Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo yang memimpin rapat tersebut di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2015)

Firman menyatakan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan pahlawan devisa negara tanpa tanda jasa. Namun banyak TKI yang diperlakukan tidak baik di luar negeri. “Ini menjadi persoalan serius dalam hal perlindungan dan keselamatan bagi TKI di luar negeri. Ini merupakan rumusan baru, terobosan baru untuk membentuk payung hukum,” tegas Firman.

Menurutnya, Undang-Undang ini sebagai payung hukumnya, sementara pemerintah mempunyai database serta informasi akurat, kami mengharapkan agar pendistribusian

tenaga kerja di luar negeri di bangun secara transparan.

Selanjutnya, kata politisi Partai Golkar ini, Baleg akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk melakukan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsep terhadap RUU PPTKILN tersebut.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi sebagai pengusul RUU Tersebut meminta kepada anggota Baleg untuk menerima RUU PPTKILN usul Komisi IX DPR tersebut. Dede berharap RUU ini bisa diselesaikan hingga akhir tahun dan menjadi terobosan baru.

Sementara, Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka menambahkan bahwa RUU ini menjadi skala prioritas utama Komisi IX. Rieke menyatakan sebetulnya pemerintah dan swasta yang paling bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap pekerjanya.

“Bulan Desember nanti, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan memasuki kawasan Indonesia. Bantuan dan dukungan serta harmonisasi dari pimpinan dan anggota Baleg akan membantu kelancaran proses RUU terbentuk,” terang Rieke.

Menanggapi pengusul RUU PPTKILN tersebut, anggota Baleg Mukhamad Misbakhun mengatakan RUU perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri tidak ideal, karena koordinasi dengan anggotanya masih kurang.

“Peran negara seharusnya diwakili oleh pusat, dengan tanggung jawab yang jelas dan diperkuat oleh BUMN, BUMD, serta badan khusus di bidang pekerja. Kekuasaan harus dikontrol, dan menjamin hak dan azas persamaan hak dan martabat seperti yang tertuang dalam Undang-Undang,” tegasnya.

Kemudian, anggota Baleg Jalaludin Rahmat berpendapat bahwa didalam mekanisme pasar, pasar yang berkuasa. Negara hanya sebagai fasilitator. Dan mekanisme diatur mulai dari rekrutment, bekerja, hingga cuti.

“Nasib TKI 60% di bidang domestik. Negara harus memperhitungkan segalanya sebelum mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, dan kita mendukung sepenuhnya apresiasi RUU, harus diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya,” jelasnya. (sc/dhi/ctr), foto: jaka.nugraha/parle/hr

DPR DUKUNG PENGUATAN KPPU UNTUK MEMBERANTAS KARTEL

Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra mengatakan, akan mendukung penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Karena menurutnya, penguatan KPPU merupakan cara untuk memberantas kartel.

“Fokus kami amandemen UU Persaingan Usaha. Kita me-

ngawal agenda ini untuk memecah kartel, menguatkan KPPU selain itu perbaiki kebijakan,” katanya dalam diskusi ‘Revisi UU No.5 tahun 2009 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’ bersama Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (1/9).

Eka menerangkan, kartel ini masalah yang tidak pernah tuntas, dan akibatnya sangat fatal. “Selain uang negara yang bisa diselamatkan sampai ratusan triliun rupiah, rakyat juga menjadi korban karena harus membeli dengan harga yang mahal. Untuk itu, KPPU harus diperkuat,” jelasnya.

Menurut Eka, ada persaingan sempurna yaitu banyak pembeli, penjual, barang mudah keluar dan masuk dan sebagainya. Kedua, ada oligarki di mana barang itu terkonsentrasi



Anggota Komisi VI DPR Eka Sastra dalam acara Forum Legislasi

pada satu orang atau kelompok dan dikuasai orang tertentu, dan ketiga, monopoli. “Karena oligarki, daging sapi Rp 120/kg di mana konsumsi daging dalam negeri mencapai 2,9 juta ton/tahun, maka keuntungan ratusan triliun,” ujarnya.

Tapi, kenapa tak bisa dihukum oleh KPPU? Karena menurut UU hanya praktek kartel yang bisa dihukum. Seperti mengadakan koordinasi, mengatur harga, mengatur pasar, dan sebagainya. “Kini, Komisi VI DPR RI sedang membahas revisi RUU Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan RUU BUMN. Ini harus kita kawal, karena jantungnya ada di kartel. Kartel beres, maka ratusan triliun uang negara bisa diselamatkan,” ujarnya.

Hanya saja kata Eka, ada kepentingan untuk melemahkan KPPU karena ada kepentingan *by design* oleh kelompok tertentu, agar kartel tetap dilanggengkan.

Juga, kata Eka, perbaikan kebijakan impor seperti garam, ternyata perusahaan, pengimpor ada saling terkait dan dekat dengan kekuasaan. “Ini harus dituntaskan, agar pengusaha bisa memproduksi barang dengan baik, dan rakyat membeli dengan harga yang wajar,” tambahnya.

Itu juga menghambat lahirnya pengusaha baru, struktur perekonomian dikuasai segelintir orang, fondasi ekonomi

rapuh. “Jadi, kita ini bangkrut di sektor komoditas bukan industri. Sayangnya, kini berkelindan antara penguasa, pengusaha dan parpol. Padahal, kalau bersatu melawan kartel, maka perekonomian akan mampu sejahterakan rakyat,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf menjelaskan beberapa hal kasus mengenai kartel, pertama ada daging beku yang disuplai ke hotel, restoran dan sebagainya, kedua sapi siap potong dan ketiga, sapi perlu penggemukan tiga bulan terlebih dahulu agar seolah-olah sebagai sapi lokal (naturalisasi). “Padahal sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mulai mengurangi impor daging sapi mulai 10 persen dari 70 persen impor,” kata Syarkawi.

Ia menambahkan, di tahun 2009 sudah 70 persen dan tiap tahun harus dikurangi 10 persen dan seterusnya harus dikurangi sampai 50 persen pada tahun 2014. Masalahnya kata Syarkawi, impor itu tidak dibarengi dengan populasi sapi di dalam negeri. “Ketika terjadi kelangkaan daging di DKI Jakarta, sebanyak 70 persen, pemerintah berusaha stabilisasi tapi gagal,” ungkapnya.

Untuk tahun 2014, ujar Syarkawi, impor sebanyak 750 ribu sapi, 2013 sebanyak 350 sapi, dan 2015 sebanyak 50 ribu sapi, tapi untuk semester ke IV belum ada kepastian. “Anehnya ketika terjadi kelangkaan ada 5.800 sapi siap potong tapi ditahan oleh kartel. Inilah yang sedang KPPU investigasi dan mulai disidangkan pada September 2015 ini,” jelas Syarkawi.

KPPU sendiri menurut Syarkawi sudah berkoordinasi dengan perusahaan impor Australia, dan siap memberikan data. Juga ada kartel garam yang dipakai untuk industri, konsumsi domestik, dan kombinasi keduanya.

“Garam ini menjadi komoditas penting karena digunakan untuk industri kertas, farmasi, kaca, pengeboran minyak dan makanan. Ada 7 perusahaan impor garam dari Australia. Sehingga rakyat membeli garam lebih mahal dan petani tambang mengalami kesulitan. Untuk kasus ini sudah disidangkan, dan hakim menghukum hanya Rp 5 miliar dari tuntutan Rp 25 miliar,” tuturnya. (nt/sc), foto : andri/parle/hr.

ABDUL KHARIS GANTIKAN SOHIBUL IMAN

Jabatan Wakil Ketua Komisi X DPR Sohibul Iman (F-PKS), kini digantikan oleh Anggota DPR Abdul Kharis Almasyhari. Sebelumnya, Kharis bertugas di Komisi XI DPR. Rapat pergantian pimpinan Komisi X ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

“Apakah pergantian dari Sohibul Iman kepada Abdul Kharis Almasyhari ini dapat disetujui?” tanya Fahri saat memimpin rapat di ruang arapt Komisi X, Gedung Nusantara I, Selasa (1/09/15). Jawaban ‘setuju’ pun diucapkan oleh seluruh peserta rapat yang hadir.

Ditemui usai rapat, Fahri mengakui, Sohibul yang menjabat Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memiliki tanggung jawab semakin luas. Sehingga, kesibukan di kedewanan harus dikurangi.

“Pak Sohibul tentu tidak bisa terlalu sibuk ketika menjabat Wakil Ketua di Komisi X karena sekarang sudah menjabat sebagai Presiden PKS, dimana tanggung jawabnya juga semakin luas, karena itulah diganti oleh Pak Abdul Kharis,”



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyerahkan palu kepemimpinan kepada Abdul Kharis Almasyhari

imbuh Politikus F-PKS itu.

Fahri berharap, dengan formasi Pimpinan Komisi X yang baru ini, menjadikan kinerja Komisi X secara umum bisa lebih baik.

“Saya kira secara umum kami sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Sohibul Iman yang telah bertugas selama hampir setahun ini. Dan kami ucapkan selamat kepada Pak Abdul Kharis, yang segera bertugas,” tambah Politisi asal Dapil NTB ini.

Sementara itu, dengan bergabungnya ke Komisi X, Kharis membawa visi dan misi untuk menjadikan Komisi X semakin memaksimalkan fungsi DPR. Ia juga berjanji akan mengoptimalkan dan memaksimalkan mitra kerja Komisi X, sehingga

pendidikan Indonesia dan seluruh bidang Komisi X akan lebih maksimal.

“Bersama dengan seluruh Anggota Komisi X, kita akan memaksimalkan sinergitas dengan mitra kerja dan memaksimalkan target bidang legislasi, dan bidang lainnya,” kata Politikus F-PKS itu.

Ketika ditanya apakah ada penyesuaian signifikan ketika berpindah dari Komisi XI ke Komisi X, Kharis menjawab; Berbeda pasti. Tapi saya juga berlatar belakang dari kampus, sehingga bisa menyesuaikan dengan cepat,” yakin Politikus asal Dapil Jawa Tengah itu. Usai rapat, Fahri menyerahkan palu Pimpinan kepada Kharis, dan seluruh Pimpinan Komisi X. (sf), foto : jaka nugraha/parle/hr.

Pimpinan DPR Lantik Wakil Ketua Komisi VIII



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai pelantikan Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah, Selasa (1/9) resmi melantik Abdul Malik Haramain menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menggantikan rekan sejawatnya dari FPKB M. Fathan.

Saat menerima Palu sidang dari Fahri Hamzah, Malik, begitu ia biasa disapa, didampingi oleh hampir seluruh Pimpina

nan Komisi VIII, yakni Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonon Daulay, para wakil Ketua Ledia Hanifa Amaliah, dan Sodik Mudjahid.

Fahri berharap agar Malik dapat berkolaborasi bersama anggota dan Pimpinan Komisi VIII untuk menjalankan tugas dan fungsi kedewanan terutama yang terkait dengan bidang-bidang yang dinaungi Komisi VIII, seperti bidang agama, sosial, bencana alam, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Sesuai dengan Undang-undang dan tata tertib dimana seremoni pelantikan pimpinan DPR harus dilakukan oleh Pimpinan DPR, dan tidak sekedar tertuang dalam SK (surat keputusan-red). Komisi VIII merupakan komisi baru bagi saya, namun sebenarnya masalah pendidikan agama, haji, bencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta masalah sosial merupakan hal yang umum, sehingga secara substansi tidak ada masalah bagi saya untuk menjalankan fungsi kedewanan terkait bidang-bidang tersebut,” ujar Abdul Malik Haramain.

Meski demikian, ia mengakui tetap masih ada hal yang harus didalami, mengingat saat ini Komisi VIII tengah menggodok beberapa undang-undang, diantaranya undang-undang penyelenggaraan haji, undang-undang disabilitas dan terakhir undang-undang pekerja sosial.

“Saya akan maksimal dan total dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai pimpinan Komisi VIII, tentunya dengan support dan kerjasama dari seluruh pimpinan dan anggota Komisi VIII lainnya,” tegas Malik. (Ayu)/foto:naefurodji/parle/iw.

REKOMENDASI IZIN IMPOR GARAM PERLU DIAWASI

Pemerintah mewajibkan importir garam agar memiliki pabrik pengolahan garam sendiri. Tanpa itu, importir tak mendapat rekomendasi impor. Kebijakan ini mendapat dukungan dari DPR, sepanjang pengawasannya diperketat.

Anggota Komisi VI DPR RI Slamet Junaedi (dapil Jatim XI) mengapresiasi kebijakan terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut. Menurutnya, dengan memperketat izin impor, serapan garam rakyat akan men-



Anggota Komisi VI DPR Slamet Junaedi

jadi maksimal. Tinggal bagaimana pengawasan terhadap kebijakan terbaru impor garam itu diawasi oleh semua pihak. Jangan sampai pemerintah kecolongan lagi oleh ulah

importir garam nakal.

“Bagus juga peraturan baru itu. Penyerapan garam rakyat otomatis akan maksimal. Cuma yang saya tekankan adalah pengawasannya. Jangan sampai mereka dikasih izin impor dengan kuota 100 ribu ton, malah mengimpor 150 ribu ton. Nah, di situlah rembesnya garam industri kerap terjadi ke pasar konsumsi. Sekali lagi pengawasannya yang penting. Impor harus jelas dengan kuota yang harus benar-benar dialokasikan untuk industri,” terang Junaedi saat ditemui sebelum Rapat Paripurna DPR, Selasa (1/8).

Politisi Partai Nasdem ini mengeluhkan pengawasan yang longgar terhadap importasi garam selama ini. Garam industri yang rembes ke pasar konsumsi selalu merusak harga garam lokal dan dikeluhkan petani karena garamnya tak terserap maksimal. Sementara itu, KKP dan Kemendag juga akan membuka lahan baru garam dan memberikan akses teknologi pengolahan garam oleh PT. Garam yang selama ini belum ada. Dengan teknologi pengolahan, panen garam bisa dipercepat.

Junaedi mendukung program tersebut, selain akan meningkatkan kapasitas produksi juga akan meningkatkan kualitas garam nasional. “Saya sangat mendukung itu. Bu Susi (menteri KKP) selalu mendengungkan jangan sampai kita impor garam. Dia memang tidak setuju impor. Saya malah mendukung dengan teknologi baru itu, karena akan menambah produksi dan meningkatkan kualitas. Mari kita bersama-sama mendukung swasembada garam,” ujarnya.

(mh)/foto:jaka/parle/iw.

RIEKE DESAK PRESIDEN PENUHI JANJI POLITIK KEPADA PEKERJA

Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mengingatkan Presiden Jokowi untuk memenuhi janji politik pada saat Pemilu Presiden kepada rakyat pekerja. Janji politik tersebut adalah Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak yang tertuang dalam Piagam Perjuangan Marsinah, ditandatangani diatas meterai oleh Jokowi tanggal 5 Juli 2014.

Di sela-sela acara Sidang Paripurna DPR Selasa (1/9) di depan Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara, politisi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi IX ini menyatakan dukungannya kepada aksi demo buruh yang digelar 1 September ini. “Saya mendukung semua tuntutan buruh dan pekerja hari ini,” serunya.

Ribuan buruh melakukan aksi di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia dengan tuntutan dari soal upah, turunkan harga kebutuhan pokok, menolak kenaikan BBM, jaminan pensiun sampai pembubaran Pengadilan

Hubungan Industrial.

Ditegaskan Rieke, bukan tanpa alasan buruh bergerak. Pada bulan September ini mulai dibahas mekanisme penentuan pengupahan untuk tahun depan. Dimulai dengan survey Komponen Hidup Layak (KHL), Oktober harus sudah ada keputusan berapa kenaikan upah tahun 2016. Selanjutnya bulan Desember masuk pada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) plus 6 negara diantaranya China, India dan Australia. “Perpindahan tanpa sekat bukan sekedar modal, barang dan jasa, tetapi juga rakyat yang bekerja,” tegasnya.

Menurutnya, kesepakatan-kesepakatan MEA belum tersosialisasi dengan baik kepada pihak-pihak terkait baik industri, pemberi kerja dan pekerja. “Belum ada *road map* kerja yang terintegrasi utuh antara Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Tenaga kerja dan BUMN. Bahkan Meneg. BUMN akan melakukan *buyback* BUMN



Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka

tidak dari APBN tapi dari dana pensiun pekerja BUMN. Mau dibawa kemana 70 tahun Indonesia merdeka?” ungkap Rieke lagi.

Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK selaku Ketua Penggalangan Buruh dalam dan luar negeri ini menyerukan pemerintah untuk melindungi dan perkuat Industri Nasional, simultan dengan Lindungi dan Penuhi Hak-hak Pekerja. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

PEMBAHASAN RUU KUHP DIMULAI DARI NOL

Pembahasan RUU KUHP periode lalu masih banyak menyisakan masalah dan baru diselesaikan hanya 10%, sehingga masih menyisakan 90%. Maka dari itu penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh DPR periode yang lalu masih jauh dari selesai.

Hal itu dikatakan anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Senin (31/8) siang. Menurut politisi PPP ini, Komisi III DPR akan membahas mulai dari nol lagi. “Karena targetnya RUU KUHP ini hanya setahun kalau bisa selesai, itu target ambisiusnya. Namun target normalnya setahun ini buku 1 selesai, terdiri 268,” katanya.

Pembahasan buku I ini dipastikan akan terjadi perdebatan lebih ramai karena menyangkut azas-azas yang sangat penting misalnya tentang po-

sisi hukuman mati. Seperti soal pasal maksimal hukuman 20 tahun diubah menjadi 15 tahun.

Pemerintah mengusulkan pidana maksimal 15 tahun, tidak lagi 20 tahun, namun boleh ditambah 5 tahun (gabungan tindak pidana), itu bisa menjadi maksimal 20 tahun. “Fraksi PPP tidak setuju kalau posisi seperti itu, namun kami tetap akan mendingar terlebih dahulu keterangan pemerintah seperti apa, karena itu terlalu ringan,” kata Arsul.

Politisi Fraksi PPP juga menegaskan, tidak setuju jika hukuman pidana mati dihapuskan, namun setuju dengan pasal-pasal yang menyangkut tentang perzinahan dan pasal tentang penghinaan Presiden.

Lebih lanjut Arsul menyatakan,



Anggota Komisi III DPR Arsul Sani

sistem remisi diperketat, karena sekarang hukuman pidana, teorinya penghukuman itu bukan lagi pembalasan namun pembinaan. “Saya setuju saja teori pembinaan, namun kalau tidak bisa dibina dalam penjara, ya dibina-sakan saja,” ia menjelaskan. (spy)/foto: jaka/parle/hr

Komisi IV Cari Solusi Tangani Pencemaran Lingkungan dan Laut



Pimpinan Komisi IV DPR saat memimpin rapat

Pencemaran lingkungan baik di wilayah daratan maupun di wilayah laut merupakan suatu ancaman yang benar-benar harus ditangani secara sungguh-sungguh. Panitia Kerja (Panja) pencemaran lingkungan dan laut, Komisi IV ingin mendapatkan solusi untuk menangani pencemaran lingkungan dan laut tersebut.

“Panja ingin mengetahui sejauh sejauh mana pencemaran yang terjadi di wilayah daratan yang menuju laut serta apa yang terjadi solusi tepat untuk menangani pencemaran lingkungan laut,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, Senin (31/8), di Gedung DPR, Jakarta.

Pencemaran lingkungan dan laut merupakan peristiwa

masuknya material pencemar seperti partikel kimia, limbah industri, limbah pertanian dan perumahan, ke dalam wilayah lingkungan darat dan wilayah lingkungan laut. “Material berbahaya tersebut memiliki dampak yang bermacam-macam, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung,” tuturnya.

Herman menjelaskan kelompok limbah kimia terbagi dua, pertama kelompok racun yang sifatnya cenderung masuk terus menerus seperti pestisida, furan, dioksin dan fenol. Terdapat pula logam berat, suatu unsur kimia metalik yang memiliki kepadatan yang relative tinggi dan bersifat racun atau beracun pada konsentrasi rendah, contoh logam berat yang sering mencemari adalah air raksa, timah, nikel, arsenik, dan cadmium.

Kelompok racun kedua adalah bahan kimia anorganik yang bisa berbahaya bagi ekosistem laut seperti nitrogen dan fosfor. Sumber dari limbah ini umumnya berasal dari sisa pupuk pertanian yang terhanyut ke dalam perairan, juga dari limbah rumah tangga berupa detergen yang banyak mengandung fosfor. Senyawa kimia ini dapat menyebabkan eutrofikasi, karena senyawa ini merupakan nutrisi bagi tumbuhan air seperti alga dan fitoplankton. “Limbah kimia yang bersifat toxic (racun) yang masuk ke perairan laut akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya,” ungkapnya.

Logam berat telah lama dikenal sebagai suatu elemen yang mempunyai daya racun yang sangat potensial dan memiliki kemampuan terakumulasi dalam organ tubuh ma-

nusia. Bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kematian. Menurut WHO (World Health Organization) dan FAO (Food Agriculture Organization) merekomendasikan untuk tidak mengkonsumsi makanan laut yang tercemar logam berat.

Sebagian besar sumber pencemaran laut berasal dari wilayah daratan, baik tertiuip angin, terhanyut, maupun melalui tumpahan. Salah satu penyebab pencemaran laut adalah kapal yang dapat mencemari sungai dan samudera dalam banyak cara, misalnya melalui tumpahan minyak, air penyaring, dan residu bahan bakar.

Efek tumpahan minyak di laut dapat dilihat dengan jelas,

seperti pada pantai menjadi tidak indah lagi untuk dipandang, kematian burung laut, ikan, dan Kerang-kerangan, meskipun beberapa dari organisme dapat selamat hidup akan tetapi menjadi berbahaya untuk dimakan. Efek periode jangka panjang misalnya perubahan karakteristik populasi spesies laut atau struktur ekologi komunitas laut.

“Hal ini tentu dapat berpengaruh terhadap masyarakat pesisir yang lebih banyak menggantungkan hidupnya di sektor perikanan dan budi daya, sehingga pencemaran akan berdampak buruk terhadap upaya perbaikan kesejahteraan nelayan,” tegas Herman Khaeron. (as), foto:ry/parle/hr

Pleno Baleg Terima 2 RUU Usul Komisi X DPR RI



Pimpinan Komisi X DPR saat rapat dengan Baleg

Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dipimpin Ketua Baleg Sarehwiyo, Senin (31/9/2015) menerima 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan Komisi X DPR RI. Kedua RUU tersebut, yaitu RUU tentang Kebudayaan dan RUU tentang Sistem Perbukuan.

“Baleg dapat menerima 2 RUU usul Komisi X DPR dengan berbagai perbaikan dari usulan anggota Baleg dalam rapat pleno hari ini,” kata Sareh di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Jakarta.

Selanjutnya, kata Sareh, Baleg akan melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep terhadap kedua RUU tersebut dengan membentuk 2 Panitia Kerja (Panja). Panja RUU Perbukuan akan dipimpin Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo, sementara Panja RUU Kebudayaan akan dipimpin Ketua Baleg Sarehwiyo.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X Ridwan sebagai pengusul RUU Kebudayaan menyatakan bahwa pemerintah atas nama negara dan bangsa memerlukan dasar hukum untuk menyusun berbagai kebijakan, strategi, dan program pelestarian kebudayaan bagi segenap pemangku kepentingan kebudayaan di Indonesia.

“Keragaman budaya di nusantara memerlukan perangkat pengaturan dan pengelolaan kebudayaan berdasar atas peraturan perundang-undangan agar menjamin harmonisasi dan sinergi antarbudaya,” kata Ridwan.

Dijelaskan politisi Partai Golkar ini, bahwa tujuan penyusunan RUU Kebudayaan ini adalah untuk meneguhkan jati diri bangsa, membangun karakter bangsa, memperkuat bangsa, dan meningkatkan citra bangsa.

Sementara, Wakil Ketua Komisi X Nuroji sebagai pengusul RUU Sistem Perbukuan menyatakan bahwa salah satu tujuan pengaturan dalam RUU Sistem Perbukuan adalah untuk mengatur sistem perbukuan secara komprehensif, karena saat ini pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

“RUU ini mengatur tata kelola perbukuan dari sisi produksi, distribusi dan penggunaan. Didalam komponen tata kelola perbukuan tersebut, RUU ini mengatur kebijakan mulai dari penyediaan buku yang berkualitas dari sisi konten,” jelas Nuroji. (sc), foto : andri/parle/hr.

Dewan Minta BKKBN Tingkatkan Kinerja

Komisi IX DPR RI meminta BKKBN untuk meningkatkan kinerjanya, agar penyerapan anggaran APBN Tahun Anggaran 2015 dapat maksimal. Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Pius Lustrilanang dengan Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/8/2015)

Menurut Wakil Ketua Komisi IX Er-

malena kepada Parlemtaria, Komisi IX mengharapkan penyerapan dana segera di maksimalkan. Karena masalah kependudukan memerlukan perhatian yang luar biasa dengan angka 250 juta penduduk Indonesia dengan permasalahan dinamika kependudukan yang ada. “BKKBN harus mengambil tindakan-tindakan khusus terutama dari segi penyerapan dana,” ujarnya.

la menilai, upaya BKKBN selama ini



Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena

turun ke masyarakat belum maksimal. Masih banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang hubungan keluarga berencana dengan kependudukan. “Untuk itu, Komisi IX mengusulkan agar program-program BKKBN terintegrasi dengan program-program yang lain agar hal-hal mulai dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Usia Lanjut dan UPPKS menjadi perhatian agar di programkan lebih sistematis lagi khususnya di usia lanjut,” paparnya.

Ermalena mengharapkan BKKBN segera menyelesaikan pendataan penduduk, karena dari pendataan ini menjadi basis penetapan program yang akan dilakukan. Data ini juga diperlukan untuk kegiatan-kegiatan program yang lain seperti BPJS. “Kita menyepakati bahwa BPJS itu di atas 90 juta penduduk, pertanyaannya siapa 90 juta ini yang kita harapkan BKKBN bisa membantu mengclearkan data-data tentang kepesertaan BPJS,” harapnya.

Dalam hal ini, ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada BKKBN, karena ini yang menjadi basic dari seluruh program. “Jika kita tidak tahu tentang *figure* dari kependudukan, maka tidak jelas pula apa yang akan dilakukan mungkin saja ada missing disana-sini ini menjadi hal yang penting untuk diselesaikan oleh pemerintah,” imbuhnya. (sc/fh), foto : *jaka nugraha/parle/hr.*

KOMISI X PANTAU PERTANDINGAN PIALA PRESIDEN 2015



Tim kunspek Komisi X DPR memantau pertandingan Sepak Bola Piala Presiden 2015

Piala Presiden 2015 secara resmi mulai digulirkan pada 30 Agustus 2015, dan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Stadion Dipta Gianyar, Bali, Minggu (30/08/15) sore. Sebagai pertandingan pembuka, dihelat pertandingan antara Persija melawan Bali United.

Sebelum pertandingan dimulai, salah satu yang menarik adalah pementasan tari tentang kondisi sepakbola nasional. Tarian yang diciptakan Profesor Wayan Dibia ini melibatkan 750 penari dan penabuh. Dari jumlah itu, 400 orang diantaranya membawakan Tari Kecak.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua X Ridwan Hisjam (F-PG) mengapresiasi langkah Pemerintah dalam menggelar turnamen sepakbola ditengah bergulirnya sanksi FIFA.

Anggota Komisi X Dadang Rusdiana (F-Hanura), menilai turnamen ini merupakan langkah komprehensif dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk memperbaiki kondisi persepakbolaan Indonesia.

“Sanksi dari FIFA dianggap sebagai momentum bagi persepakbolaan Indonesia dalam rangka mengevaluasi apa yang selama ini terjadi,” kata Dadang singkat, usai pertandingan.

Selama memantau pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Bali United dengan skor 3-0 atas Persija itu, beberapa Anggota Komisi X menilai pertandingan sangat seru. Tak dipungkiri, Persija mendapat perlakuan sengit dari tuan rumah.

Sebelumnya, dalam pidato pembukaannya, Presiden Joko Widodo menyatakan, Indonesia tidak apa-apa

mendapat sanksi FIFA untuk menuju sepak bola yang lebih baik. Untuk reformasi sepakbola dan kebangkitan sepakbola memerlukan langkah besar.

“Kita harus sedikit bersabar dan berkorban. Tidak apa-apa kita diberi sanksi oleh FIFA, tidak bertanding di dunia internasional juga tidak apa-apa, daripada kita juga kalah terus,” kata Presiden, pesimis.

Presiden menambahkan, bahwa kebangkitan sepakbola Indonesia, pembenahan total, reformasi persepakbolaan nasional, adalah pilihan yang harus diambil untuk membangun prestasi sepakbola nasional di masa yang akan datang.

“Semua pihak harus mendukung langkah ini. Semua harus berani berkorban, semua harus berkorban. Ini pil pahit yang harus kita telan, agar sepakbola kita sehat, agar sepakbola kita berkembang,” tegas Presiden.

Usai memberikan pidato pembukaan, Presiden menendang bola sebagai pertanda dimulainya turnamen ini. Presiden didampingi Menpora Imam Nahravi, Ketua PSSI La Nyalla Matalliti, dan Presiden Mahaka Group, Erick Thohir.

Kunjungan spesifik ini diikuti oleh Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, Anggota Komisi X Asdy Narang (F-PDI Perjuangan), Junico BP Siahhan (F-PDI Perjuangan), Zulfadhli (F-PG), Sutan Adil Hendra (F-Gerindra), Ida Bagus Putu Sukarta (F-Gerindra), Lucky Hakim (F-PAN), Nur Hasan Zaidi (F-PPS), Dedi Wahidi (F-PKB), Anas Thahir (F-PPP), dan Kresna Dewanata Phrosakh (F-Nasdem). (sf)/foto:sofyan/parle/iw.



Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Mustafa Kamal, menerima masukan dari berbagai pihak yang mendalami agraria terhadap draft RUU dan naskah akdemis RUU Pertanahan yang saat ini sedang disusun oleh Komisi II DPR.

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB Aman) dalam RDPU dengan Komisi II DPR berkesempatan memberi masukan terkait pembentukan RUU Pertanahan, di Jakarta, Senin (31/8).

Sekjen KPA Iwan Nurdin dalam laporannya menjelaskan, KPA berkesempatan memberikan masukan salah satunya tentang Hak atas Tanah, "Terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) menurut kami dan mengacu kepada penjelasan UUPA 1960, sesungguhnya diprioritaskan kepada koperasi milik petani atau rakyat, untuk menghasilkan masyarakat pertanian modern, perlindungan terhadap lahan pertanian cenderung terpecah akibat hukum waris dan lain-lain," kata Iwan.

Ia menambahkan, pembatasan minimum maksimum kepemilikan HGU swasta ukurannya tidak berdasarkan kepadatan penduduk provinsi dan ketimpangan agrarian yang terjadi.

"Oleh karena ini, dalam RUU ini tidak disebutkan jangka waktu HGU, untuk mencegah monopoli dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber-sumber agrarian," terangnya.

Tujuan dari Reforma Agraria juga tidak dijelaskan di RUU ini, ujar Iwan, serta keterlibatan dan pelibatan masyarakat tidak diatur. "Dibutuhkan sinkronisasi UU Pertanahan dengan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan dan UU Desa," urainya.

Mengenai penyelesaian sengketa, KPA menurut Iwan memberikan pandangan dalam menyelesaikan konflik atau sengketa agrarian sangat legal formal, "Apakah peradilan khusus yang di usulkan 'Peradilan Pertanahan' yang kelembagaannya mirip seperti PHI untuk perubahan yang tidak begitu efektif," terang Iwan.

Dalam RUU ini, kata Iwan, juga belum menyentuh konflik agraria, sebab agraria adalah pertentangan klaim hak atas tanah akibat kebijakan yang meli-

KPA DAN PB AMAN BERI MASUKAN RUU PERTANAHAN



Wakil Ketua Komisi II DPR Mustafa Kamal

batkan masyarakat luas dan meliputi banyak dimensi sosial politik.

Sebaiknya, tambah Iwan, dibentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria untuk menangani kasus-kasus yang lintas sektoral, multidimensi dan korban yang luas akibat kebijakan dan perampasan tanah masa lalu sebagai jembatan sebelum dibentuknya Pengadilan Pertanahan.

Sementara itu, menurut Dir. Advokasi Hukum dan HAM PB Aman Eramus Cahyadi memberikan beberapa usulan dalam penyusunan RUU Pertanahan, diantaranya berkaitan dengan wilayah adat, RUU Pertanahan mestinya disusun dengan menggunakan pendekatan HAM, yang memberi ruang pada proses-proses pemulihan hak masyarakat adat atas wilayah adat.

"Dalam UUPA tidak mencantumkan bahwa wilayah adat atau hak ulayat itu sebagai salah satu jenis hak seperti hak milik, HGU, Hak Pakai dan lain-lain," terangnya.

Dalam RUU Pertanahan, ujar Eramus, semestinya mengklarifikasi 'wilayah adat' sebagai 'hak milik' suatu masyarakat adat, "Jika tidak demikian, pertanyaannya adalah hak dalam kategori apakah wilayah adat itu?" tanya Eramus.

Ia menambahkan, jika mengacu pada putusan MK 35/PUU-X/2012, maka lebih masuk akal jika 'wilayah adat' itu dikategorikan sebagai 'hak milik' suatu masyarakat adat.

"Jika wilayah adat tidak diatur sebagai 'hak milik' masyarakat adat, maka

wilayah-wilayah adat kembali rentan diambil alih tanpa konsultasi dan persetujuan masyarakat adat," tegasnya.

Selain itu, usulan PB Aman mengenai Bab tentang Pendaftaran Tanah diusulkan untuk diubah menjadi Bab tentang "Pendaftaran Tanah dan Wilayah Adat".

"Dengan penjelasan sebelumnya, adalah lebih masuk akal untuk memasukkan wilayah adat ke dalam kategori 'Hak Milik' suatu masyarakat adat, maka pendaftaran tanah ini semestinya dilakukan dengan kesadaran bahwa pendaftaran tanah tidak saja ditujukan kepada hak milik pribadi tetapi juga hak milik suatu masyarakat adat yang sifatnya kolektif," papar Eramus.

Mengapa hal ini penting, jelas Eramus, karena salah satu sumber konflik di atas wilayah adat adalah karena wilayah adat itu tidak terdaftar didalam buku tanah. "Disinilah diperlukan suatu kreasi baru untuk mendesain buku tanah yang tidak hanya diperuntukan bagi hak milik pribadi tetapi juga hak milik bersama suatu masyarakat adat atas wilayah adatnya," terangnya.

Ia menambahkan, jika hal ini dilakukan, maka RUU ini menjawab permasalahan selama ini, dimana wilayah adat yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat adat tidak diakui secara hukum atau lebih tepatnya, selama ini tidak ada aturan yang memadai dan memungkinkan wilayah adat milik masyarakat adat terdaftar di dalam administrasi pertanahan. (nt) foto:ry/parle/ray

Penghargaan dari Presiden Jokowi untuk Karyawan Setjen MPR, DPR dan DPD



Wakil Sekjen DPR Achmad Juned menyematkan Satya Lencana

39 orang karyawan Setjen MPR, 199 dari Setjen DPR dan 19 dari Setjen DPD mendapat Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan ini diberikan atas kesetiaan mengabdikan kepada negara selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

“Selamat kepada karyawan yang telah mendapat Satyalancana Karya Satya. Saya harap semua bisa memperta-

hankan semangat mengabdikan kepada bangsa dan negara,” kata Sekjen MPR RI Eddie Siregar selaku pembina upacara di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8/15).

Ia bersama Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Wakil Sekjen DPD Zul Evi Astar, Wakil Sekjen DPR Achmad Juned serta sejumlah pejabat lain kemudian menyematkan secara resmi pin tanda kehormatan kepada karyawan terpilih yang sudah berdiri di tengah lapangan upacara.

Marjoni Zuhdi karyawan Setjen DPR yang mendapat tanda kehormatan 30 tahun pengabdian kepada negara menyampaikan keharuannya setelah mendapat penghargaan ini. Ia mengenang kembali masa tugasnya di kesetjanaan mulai dari era demokrasi pada saat orde baru sampai kepada parlemen era reformasi sekarang ini.

“Saya memiliki kenangan dan menyaksikan sendiri bagaimana perjalanan demokrasi bangsa di gedung parlemen ini. Era orde baru pejabat sekjen biasa ditunjuk seorang perwira tinggi militer jadi bisa dibayangkan bagaimana DPR saat itu, beda sekali dengan saat ini,” tutur dia.

Dalam lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80/TK/Tahun2015 ada dua orang karyawan yang mendapat penghargaan pengabdian 30 tahun, satu lainnya adalah Yudhi Purwanta. Kegiatan yang merupakan bagian dari upacara dalam rangka Peringatan HUT MPR dan DPR ke-70 ini berlangsung khidmat. (iky) foto: naefuroji/parle/hr

RUU Merek Segera Dibahas di DPR

Seluruh Fraksi didalam Pansus RUU Merek menyetujui RUU Merek segera dibahas dalam pembahasan Tingkat I, yaitu di tingkat Panitia Khusus (Pansus). Hal itu mengemuka saat Pansus RUU Merek mengadakan Raker dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dipimpin oleh Ketua Pansus Merek Desy Ratnasari, di Ruang Pansus B, Senin, (31/8).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Wenny Haryanto mengatakan, RUU Merek yang baru nantinya harus mempertimbangkan ketentuan mendasar serta memberikan kepastian hukum serta mengikuti perkembangan ekonomi dunia.

“Perkembangan terpenting yaitu memberikan perlindungan merek baru dan non tradisional serta perluasan makna terkait merek tersebut, selain itu, perlu adanya penyederhanaan proses dan produser merk serta penyelesaian sengketa kedepannya. Disisi lain, sanksi pidana yang ada saat ini masih belum membuat orang jera,” jelasnya.

Dia mencontohkan, masih maraknya pelanggaran merek di bidang obat-obatan, oli dan pelumas. “Semuanya sangat merugikan karena itu perlu sanksi pidana dan hukuman badan yang diperberat,” terangnya.

Selain itu, RUU Merek ini tujuannya harus dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat dan dukungan bagi sektor industri maupun perdagangan.

Sementara anggota DPR dari F-Gerindra Wihadi Wiyanto mengatakan, RUU merek sangat penting untuk segera diundangkan, karena dalam hitungan bulan, Indonesia akan



Anggota Pansus RUU Merek Wihadi Wiyanto berjabat tangan dengan Menkumham

menghadapi AFTA (ASEAN Free Trade Area). “Kita harapkan RUU merek dapat memberikan perlindungan karena adanya keseimbangan dan keadilan merek yang menjadi salah satu karya eksklusif, selain itu RUU ini harus memberikan kepastian hukum dan ketentuan pidana yang jelas, selain juga adanya kemudahan dalam mendaftarkan merek

dagang,” jelasnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan, RUU Merek diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat. Melalui, RUU ini, diharapkan adanya kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran merek sesuai proses dan prosedurnya.

“RUU ini juga memberikan perlindungan hukum terdaftar bagi pelanggan, serta menyesuaikannya dengan ketentuan internasional. Jangka waktu substantif yang semula 14 bulan sekarang menjadi 8 bulan, ini menjadi lebih efisien dan memangkas waktu yang signifikan,” tandasnya. *(Si/citra, foto : jaka nugraha/parle/hr.*

WAKIL RAKYAT PERLU RAJIN TURBA



Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) DPR RI ke-70 tahun, banyak harapan yang dikemukakan para anggota DPR sendiri. Salah satunya dari Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso (F-PDI Perjuangan) yang berharap agar para wakil rakyat bisa lebih rajin turun ke bawah (Turba) menemui rakyat kecil di

dapilnya masing-masing.

“Menurut saya teman-teman anggota DPR ini harus rajin Turba. Tanpa Turba langsung, akan terjadi kesenjangan kesejahteraan di masyarakat. Mungkin dengan program dana aspirasi yang Rp20 miliar itu, kehadiran para wakil rakyat baru bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri di dapilnya,” ujar Imam saat ditemui usai Rapat Paripurna HUT DPR, Jumat (28/8).

Imam mengungkapkan, selama ini masyarakat selalu berharap lebih kepada wakil rakyat untuk memenuhi semua tuntutan dan aspirasinya. Bila hanya banyak bicara tanpa aksi konkret dan nyata, masyarakat selalu mencibir para wakil rakyat itu. Ketika DPR membahas dana aspirasi dapil, maka itu seperti menjadi pelipur lara bagi para wakil rakyat saat menemui konstituennya di dapil masing-masing.

“Selama ini kita hanya mencatat saja aspirasi yang disuarakan masyarakat. Karena tidak bisa membantu secara konkret, sering kali kita ditertawakan masyarakat. Mungkin DPR dinilainya hanya omong kosong. Nah, dengan anggaran aspirasi itu, kita bisa mengusulkan program pembangunan dapil dengan anggaran yang ada,” paparnya.

Politisi dari dapil Jateng III (Blora, Rembang, Pati, Grobogan) ini, mengatakan, dana aspirasi sebesar itu sebenarnya relatif kecil untuk membantu pembangunan di empat kabupaten. Bahkan, banyak anggota DPR dari dapil Kalimantan yang malah lebih luas dapilnya karena mewakili satu provinsi. Bila semua dana dapil itu cair, lanjut Imam, berarti itu bantuan untuk seluruh wilayah NKRI. *(mh)/foto:naefurodji/parle/iw.*

Lebih Semangat Mensejahterakan Masyarakat

Momentum perayaan ulang tahun DPR ke-70 ini harus menjadikan para wakil rakyat lebih semangat bekerja menyejahterakan rakyat Indonesia. Koordinasi antarpara anggota menjadi keniscayaan untuk menumbuhkan etos kerja dan keseragaman tujuan membangun bangsa dan negara.

Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani (F-PG) mengemukakan hal tersebut saat ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna untuk menyambut HUT DPR RI, Jumat (28/8). “Kita harus menjadi satu kesatuan, tidak ada yang terpisah. Sehingga ada koordinasi dan keseragaman dalam

memperjuangkan aspirasi rakyat,”

Endang berharap, momentum HUT DPR yang menggembirakan ini mampu menampilkan DPR yang lebih baik. Pengalaman masa lalu harus dijadikan acuan koreksi dan semangat untuk menyejahterakan masyarakat. Sementara sebagai Anggota Komisi VI sendiri, Endang sudah melakukan aksi nyata di tengah masyarakat. Misalnya, ia menggelar pasar murah, pengobatan gratis, dan membantu UMKM serta koperasi di dapilnya.

Politisi dari dapil Jateng V (Boyalali, Klaten, Sukoharjo, Solo) ini, selalu cepat merespon keinginan masyarakat



Anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti Handayani di dapilnya. Ketika masyarakat miskin mengeluhkan kualitas beras yang diterimanya, Endang langsung mendatangi Bulog setempat untuk mengawasi kualitas beras untuk rakyat miskin (Raskin). Akhirnya, beras yang diterima pun kian baik kualitasnya. *(mh)/foto: naefuroji/parle/iw.*

Peningkatan Anggaran Harus Didukung Peningkatan Kualitas Kemen.PP&PA

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi peningkatan anggaran yang diberikan pemerintah kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA) sebesar 1,269 triliun untuk Pagu anggaran tahun 2016.

“Ini merupakan sejarah tersendiri, dan tentunya atas desakan Komisi VIII untuk memberikan tambahan anggaran dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya sekitar 217 miliar,” ungkap Saleh usai Rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana S Yembise, Senin (31/8) di ruang rapat Komisi VIII, Senayan Jakarta.

Saleh mengakui penambahan anggaran tersebut tentu masih jauh dari kata cukup jika dibanding dengan tugas Kementerian PP & PA ini yang harus mengurus berbagai permasalahan seputar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indonesia dengan jumlah rakyatnya sekitar 250 juta orang. Meski demikian ia melihat ada sebuah optimisme tersendiri dari Menteri PP & PA untuk lebih memberdayakan kementerian ini, sejalan dengan

semangat yang selalu didorongkan oleh Komisi VIII DPR RI.

Dengan demikian Saleh berharap agar melalui program-program yang disusunnya Kementerian ini mampu berbuat lebih banyak lagi untuk meningkatkan kualitas kerja dalam memberdayakan perempuan sekaligus melindungi anak Indonesia.

“Tadi sempat dikatakan ibu menteri bahwa dengan peningkatan anggaran yang diberikan pemerintah kepada kementerian ini, maka pihaknya telah membuat sejumlah program baru selain program-program lainnya yang telah ada sebelumnya. Namun, apa program baru itu? Pejabat eselon satu kementerian ini yang akan memaparkannya dalam rapat dengar pendapat berikutnya,” jelas Politisi dari Fraksi PAN ini.

Pada kesempatan itu Saleh juga berharap agar dengan adanya peningkatan anggaran Kementerian ini dapat langsung digunakan untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak Indonesia. Ia juga berharap semangat dari Menteri PP & PA dan dorongan dari Komisi VIII DPR RI



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay

ini juga didukung dengan perubahan kebijakan pemerintah untuk menjadikan Kementerian ini sebagai Kementerian teknis, dan bukan sekedar sebagai koordinator saja.

“Selama ini Kementerian PP & PA hanya sebagai kordinator berbagai kementerian yang ada, namun pelaksanaan berbagai program itu ada pada Kementerian terkait yang belum tentu menjadi mitra kerja Komisi VIII,” paparnya. (Ayu), foto : naefurodje/parle/hr.

Setjen MPR, DPR dan DPD Harus Bisa Jadi Agen Perubahan



Suasana upacara HUT MPR/DPR RI ke-70

Karyawan Setjen MPR, Setjen DPR dan Setjen DPD yang berada di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun MPR dan DPR yang ke-70. Upacara berlangsung khidmat tidak jauh dari bangunan bersejarah, Gedung Nusantara yang mulai dibangun pada era Presiden Soekarno Maret 1965.

Bertindak selaku pembina upacara Sekjen MPR RI Eddie Siregar yang mengajak seluruh karyawan untuk siap menjadi agen perubahan. “Kita harus bisa menjadi agen perubahan baik karyawan Setjen DPR, Setjen DPD maupun Setjen MPR, membantu anggota MPR, DPR dan DPD bekerja sesuai dengan sumpah dan janji mereka,” katanya saat menyampaikan sambutan, Senin (31/8/15).

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan pesan dari Sekjen DPR dan DPD yang turut hadir dalam upa-



cara tersebut. Eddie sempat melirik ke arah koleganya sambil meminta persetujuan. “Boleh Bu Sekjen saya sampaikan pesannya ya,” tutur dia kepada Sekjen DPR Winantuningtyastiti.

Penekanan dari Sekjen DPR adalah perlunya menjaga sikap bijak pada kondisi politik terkini dan kemudian membangun kondisi kondusif dalam suasana kerja. Sementara Sekjen DPD mengimbau agar seluruh karyawan menjaga soliditas dan solidaritas di tengah sejumlah isu politik yang mengemuka dari kompleks parlemen ini.

Kepada Parle usai acara Eddie mengaku menghubungi dua koleganya tersebut lewat pesan singkat di telepon genggamnya beberapa waktu sebelum pelaksanaan upacara. “Kita perlu saling koordinasilah, dan hasilnya tadi saya sampaikan kepada seluruh karyawan,” ujar dia.

Rangkaian prosesi upacara berlangsung lancar, di tengah sejujunya menanti pagi menyinari rimbunnya pohon hutan kota yang terawat baik di kompleks wakil rakyat ini. Dalam upacara kali ini juga diberikan penghargaan

Satyalancana Karya Satya kepada karyawan yang sudah mengabdikan kepada negara selama 10, 20 dan 30 tahun.

Pada bagian akhir acara seluruh peserta upacara mengangkat tangan, mengaminkan bersama doa yang disampaikan. “Ya Allah mudahkanlah upaya mengukuhkan semangat netralitas dan menjaga integritas serta meningkatkan profesionalitas guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan terlaksananya reformasi birokrasi.” Aamiin ya robball alamin. (iky), foto : jaka/parle/hr.

SELURUH FRAKSI DPR SEPAKAT BAHAS RUU PATEN



Ketua Pansus RUU Paten DPR John Kennedy Aziz berjabat tangan dengan Menkumham

Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui dibahasnya RUU Paten. Hal tersebut menjadi kesimpulan dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Paten DPR RI yang dipimpin John Kennedy Aziz dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mewakili pemerintah, Rabu (2/9) di Senayan Jakarta.

Pandangan Fraksi PAN yang dibacakan oleh anggotanya terkait dengan RUU Paten ini menilai bahwa fraksinya menyetujui dibahasnya RUU Paten tentang perubahan atas UU Paten No.

14 Tahun 2001. PAN menilai perlunya hak eksklusif sebagai apresiasi negara atas suatu karya seseorang. Selain tentunya memberikan perlindungan kepada penemuan atau karya seseorang, serta untuk memancing orang lain untuk berkarya dan menemukan inovasi.

“Hampir 90 persen Hak Paten yang didaftarkan ke HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) berasal dari luar negeri, sisanya sebesar 10 persen dari dalam negeri. Meskipun sejak tahun 2001

domain paten ada juga di Indonesia. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan,” ucap Anang.

Anggota Komisi X DPR RI ini mengungkapkan ada beberapa hal yang harus diatur dalam RUU Paten ke depan, yakni ketentuan kemudahan mendapatkan paten oleh masyarakat, yang juga harus dibarengi dengan pemberian insentif. Dalam RUU Paten tersebut juga harus memberikan perlindungan optimal kepada karya atau penemuan inovasi.

Sementara itu Fraksi PKS yang ikut menyetujui dibahasnya RUU Paten ini melalui anggota Fraksi PKS, Nasir Djamil mengungkapkan bahwa pihaknya memahami UU tentang Paten ini dalam dua perspektif, yakni sebagai payung hukum yang memberi alas bagi negara untuk melakukan pelayanan publik dalam penerbitan paten. Kedua, secara substantif sebagai bentuk perlindungan hukum atas invensi dan inovasi di bidang teknologi dan industri.

“Oleh karena itu regulasi tentang paten ini sangat penting mengingat paten tidak hanya memiliki kekuatan hukum untuk melindungi pemilik inovasi, melainkan juga dapat memberi nilai ekonomi kepada pemilik inovasi tersebut untuk mendapat keuntungan dari inovasi dan invensi yang diciptakannya,” jelas Nasir Djamil. (Ayu), foto : naefurodjie/parle/hr.



Komisi X DPR RI memantau pelaksanaan Piala Presiden 2015, yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Kunjungan Spesifik ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam, Minggu (30/08). Foto :Sofyan/Parle/HR



Donor Darah Setjen DPR RI dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI dan HUT DPR/MPR RI ke-70, Rabu (26/08) Foto : Jaka Nugraha/Parle/HR



Dharma Wanita Persatuan Setjen DPR RI bersilaturahmi kelompok II di Kementerian Pertahanan RI, Rabu (02/09) Foto : Iwan Armanais/Parle/HR